PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

TRI HARTITIK
B 200090160

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Yang ditulis oleh :

TRI HARTITIK

B 200 090 160

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut layak untuk dipublikasikan

Surakarta, Februari 2014

Pembimbing

(Drs. Wahyono, MA, Ak)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, M.Si)

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011". Adapun tujuannya adalah untuk meganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapattan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam hal penyusunan kebijakan dimana yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD dan APBD.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Laporan realisasi APBD yang berupa jumlah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Metode pengumpulan data yang digunakan yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini mengunakan alat analisis regresi berganda.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < \alpha = 0,05$); sehingga ada pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 dibawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,007 > \alpha = 0,05$); sehingga ada pengaruh signifikansi antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi 0,000 dibawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < \alpha = 0,05$); sehingga ada pengaruh signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah. PDRB diperoleh nilai signifikansi 0,004 dibawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,004 > \alpha = 0,05$); sehingga ada pengaruh signifikansi antara PDRB terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah

A. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota, Pemereintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Penerimaan pemerintah ini hendaknya diolokasikan untuk berbagai kepentingan publik atau masyarakat.

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Maryanti dan Endrawati (2010) PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemeritah daerah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD berdampak pada perekonomian daerah.

Menurut Undang-Undang No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan dinyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Menurut Halim (2002:65) DAU adalah dana

yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaranya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan mengunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan asli masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian yaitu atas harga berlaku (*at current market*) yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflasi di dalamnya dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*) yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Oleh karena itu daerah tidak akan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan

penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Maryanti dan Endrawati, 2010).

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah Mutiara (2006) *Flypaper effect* pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten atau kota di pulau sumatera. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah,pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan dengan mengambil judul **"PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)".**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Bab VIII, Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah (pusat) didaerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No. 33 tahun 2004 berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun contoh Dana Alokasi Umum yaitu belanja pegawai, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dll.

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas

bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Menurut Suparmoko (2002), dana alokasi umum untuk provinsi dialokasikan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

(Bobot Provinsi) x (DAU Provinsi).

Sedangkan dana alokasi umum untuk Kabupaten/kota dialokasikan atas dasar rumusan alokasi:

(Bobot Kab/Kota) x (DAU Kab/Kota)

Menurut Suparmoko (2002), dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Adapun contoh Dana Alokasi Khusus yaitu pembiayaan dalam bidang pendidikan, pembiayaan dalam bidang kesehatan, pelayanaan umum, dll.

Menurut Halim (2001), tujuan dari DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan di daerah.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah:

1. Penerimaan pemerintah daerah propinsi = bagian daerah + dana alokasi umum (DAU) + dana alokasi khusus (DAK)
2. Bagian daerah = 90% (PBB) + 80% (BPHTB) + 16% hasil hutan + 16% hasil tambang + 3% minyak bumi + 6% gas alam,
3. DAU = 10% x 25% x APBN (penerimaan dalam negeri)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah sesuai PERDA, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Menurut UU No.33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujutan desentralisasi. Menurut Halim (2008:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross Notional Product (GNP)* tanpa memandang apakah itu kenaikkan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad 1999).

Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Perbedaan DAU, DAK, dan PAD yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain.

Belanja Daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP Kepmendagri No. 13/2006 dan revisinya Kemendagri No. 59 tahun 2007 disebutkan bahwa

belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan perundang-undangan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2002:12). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen/variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen/variabel yang dipengaruhi.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan variabel independen terhadap Belanja Daerah yang merupakan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel penelitian melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik yang selanjutnya diambil interpretasi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersumber dari laporan realisasi APBD yaitu jumlah realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Metode analisis data menggunakan analisis regresi yang diolah dengan bantuan *software* SPSS.

Analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Daerah, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 dDAK + \beta_3 PAD + \beta_4 PE + e$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

β_2 = Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK)

β_3 = Koefisiensi Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_4 = Koefisien Regresi pertumbuhan ekonomi

DAU = Jumlah DAU

PAD = Jumlah PAD

e = error term

Pengujian analisis regresi yang terdapat pada pengujian hipotesis, dapat dilakukan jika model dari penelitian telah memenuhi asumsi klasik. Data memenuhi asumsi klasik yaitu data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

D. PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi dari hasil suatu data. Statistik deskriptif berisi nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi atas variabel-variabel penelitian.Hasil perhitungan diperoleh data statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
STASTISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
DAU	97	2.37E5	8.36E5	5.2895E5	1.37594E5
DAK	97	9871.00	1.01E5	5.6036E4	18102.04851
PAD	97	22545.00	4.27E5	7.7044E4	51618.79424
PDRB	97	91302.00	2.27E7	4.1976E6	3.73319E6
BD	97	3.91E5	2.02E6	8.6838E5	2.75423E5

Sumber : Data Sekunder diolah, 2013

Analisis regresi berganda untuk melihat adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel IV.2

Tabel IV.2
HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

Variabel	Koefisien	t_{hitung}	Signifikansi
Konstanta	-63640,018	-2,643	0,010
DAU	1,228	20,406	0,000
DAK	1,176	2,770	0,007
PAD	2,348	11,474	0,000
PDRB	0,008	2,946	0,004
Adjusted R^2	0,959		
F Statistik	556,498		0,000

Sumber: Data sekunder diolah, 2013

Dari hasil analisis regresi tesebut dapat disusun persamaan sebagai berikut:

PE =-63640.018+1.228DAU–1.176DAK+2.3481PAD+0.008PDRB

Berdasarkan tabel IV. 2 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstan untuk persamaan regresi menunjukkan sebesar –63640.018. Artinya jika DAU, DAK, PAD, dan PDRB dianggap konstan/tetap, maka belanaja daerah akan menurun sebesar Rp. 63640.018
2. Nilai koefisien DAU sebesar +1.288 menyatakan bahwa jika tejadi kenaikan DAU sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap kenaikan BD sebesar Rp 1.288 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan DAU sebesar Rp. 1 milyar, maka akan berdampak terhadap penurunan BD sebesar Rp 1.288 milyar.
3. Nilai koefisien DAK sebesar –1.176 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan DAK sebesar Rp 1 milyar, maka maka akan berdampak terhadap penurunan BD sebesar Rp 1.176 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan sebesar DAK Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap kenaikan BD sebesar Rp 1.176 milyar.
4. Nilai koefisien PAD sebesar +2.3481 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap

kenaikan BD sebesar Rp 2.3481 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan PAD sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap penurunan BD sebesar Rp 2.3481 milyar.

5. Nilai koefisien PDRB +0.008 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan PDRB sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap kenaikan BD sebesar Rp 0.008 milyar. Sebaliknya apabila terjadi penurunan PDRB sebesar Rp 1 milyar, maka akan berdampak terhadap penurunan BD sebesar Rp 0.008 milyar.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh DAU, DAK, PAD, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < α = 0,05.
2. DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,007 > α = 0,05.
3. PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,000 < α = 0,05.
4. PDRB berpengaruh signifkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,004> α = 0,05.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi, Agustus 2006.

Afrizawati. 2012. *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.* Jurnal ekonomi dan informasi akuntansi. Vol.2 No.1, Januari 2012.

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2012. Diposkan tanggal 16 Februari 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja_Daerah.

Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yongyakarta, BPFE UGM.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi, Juli 2007.

Diah Ayu K. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).* JAAI VOLUME 11 NO. 1, JUNI 2007: 67 80.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi, Juli 2007.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UGM.

Khariani, Siti. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).* Kajian Ekonomi, Vol.7 No.1, 2008.

Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.* Simposium Nasionol Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006.

Maryanti, ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat.* Jurnal Akuntansi dan Manajemen, vol 5, No. 2, Desember 2010.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentealisasi Fisksl dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodelogi Penelitian untuk bisnis*. Jakarta, Salemba Empat.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Edisi pertama, Yongyakarta, Andi.

Undang-Undang No. 104 Tahun 2000. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No. 28. *Pajak Daerah.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

www.djkd.depkeu.go.id

www.jateng.bps.go.id